

PROSPEK BERITA PEMILU DALAM MEMBENTUK MEMORI KOLEKTIF KHALAYAK

Oleh: Ana Nadhya Abrar*

Pendahuluan

Beberapa waktu yang lalu, Harry Roesli, seniman musik yang sangat peduli dengan kehidupan pengamen jalanan, mengungkapkan pendapatnya tentang berita pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, berita pemilu tidak penting lagi. Meskipun pemilu dimenangkan oleh partai anti status quo, *toh* di di MPR ada 65 orang utusan golongan, 135 orang utusan daerah dan 38 orang anggota TNI. "Jadi jelas dong siapa yang mayoritas di MPR? Nah, apa pentingnya lagi berita-berita itu? Sudah tahu *happy ending*-nya kok!", tambah Harry Roesli. (*Kompas*, 04/06/1999).

Pendapat Harry Roesli tersebut masuk akal. Sebab, pertama, ia menggunakan logika angka dalam meramalkan apa yang akan terjadi dalam pemilihan presiden di MPR kelak. Pemakaian logika ini terasa logis. Kalangan ahli politik memang berpendapat bahwa hakekat dari pemilu adalah pengumpulan angka. Segala kegiatan pemilu berorientasi pada pencarian suara yang sebanyak-banyaknya, yang pada gilirannya menentukan jumlah kursi di DPR.

Hasil penghitungan sementara perolehan suara pemilu hingga awal Juli 1999 menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memperoleh kursi paling banyak di DPR. Tetapi, jumlah kursi yang banyak itu tidak otomatis mengantar ketuanya, Megawati Soekarnoputri, ke kursi presiden. Sebab, masih terdapat berbagai aspek yang menggajalnya. Salah satu di antaranya adalah, PDI Perjuangan tidak memiliki kursi yang cukup di MPR.

* Staf Pengajar dan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Kedua, Harry Roesli menggunakan logika manfaat dalam menentukan penting-tidaknya sebuah berita. Pemakaian logika ini juga masuk akal. Kalangan pengamat dan praktisi jurnalisme memang sepakat bahwa berita yang patut disiarkan kepada khalayak adalah berita yang benar, penting dan bermanfaat buat khalayak. Kalau sebuah berita pemilu tidak memenuhi ketiga kriteria ini, maka sebaiknya berita tersebut tidak disiarkan kepada khalayak.

Memang banyak, tentunya, arti penting dan manfaat berita pemilu. Tetapi, satu yang senantiasa ditunggu-tunggu khalayak adalah, partai yang menjadi pemenang memperoleh jatah kursi presiden. Begitu berita pemilu mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan menjadi pemenang dalam Pemilu 1999 dan calon tunggal presiden dari PDI Perjuangan tidak langsung memperoleh kursi presiden, khalayak menganggap berita itu tidak bermanfaat buat mereka. Khalayak harus mencari manfaat yang lain.

Tentu, yang menjadi masalah sekarang bukan pendapat Harry Roesli, melainkan manfaat lain dari berita pemilu. *Apa sebenarnya manfaat penyiaran berita pemilu di Indonesia? Bagaimana seharusnya penyiaran berita pemilu agar bermanfaat buat khalayak? Apakah mungkin berita pemilu bisa membentuk memori kolektif khalayak tentang kehidupan politik yang lebih baik?* Uraian berikut akan mendiskusikan jawaban-jawabannya.

Makna Berita Pemilu

Berita pemilu merupakan laporan tentang peristiwa atau ide yang berkaitan dengan pemilu. Tidak semua peristiwa atau ide tentang pemilu yang layak ditulis jadi berita. Hanya peristiwa atau ide tentang pemilu yang memiliki nilai berita (*newsvalue*) saja yang layak ditulis jadi berita. Tidak semua berita tentang pemilu layak disiarkan kepada khalayak. Hanya berita yang memiliki nilai layak berita (*newsworthy*) yang pantas disiarkan kepada khalayak. Dengan begitu, semua berita pemilu yang sampai kepada khalayak sudah mengalami saringan yang cukup ketat. Kalau kemudian berita pemilu tersebut dianggap tidak bermanfaat, maka yang perlu didiskusikan adalah persoalan nilai berita (*newsvalue*) dan layak berita (*newsworthy*) dari media massa yang menyiarkannya.

Setiap media massa menganut nilai berita sendiri. Tidak ada keharusan sebuah media massa untuk memiliki nilai berita tertentu. Tetapi, secara umum nilai berita yang memasyarakat adalah, penting, terkenal, luar biasa, dekat, aktual dan manusiawi. Dengan demikian, media massa merasa peristiwa atau ide tentang pemilu yang penting bagi khalayak, menyangkut orang terkenal, dekat dengan khalayak (baik emosional maupun geografis), baru terjadi dan bersifat manusiawi pantas ditulis dalam bentuk berita. Berita pemilu hasil penerapan nilai berita seperti ini tidak langsung disiarkan. Berita tersebut kemudian diserahkan pada *gatekeeper*¹ untuk diuji. Pada saat diuji ini, kriteria yang dipakai *gatekeeper* adalah, layak berita (*newsworthy*), yang terdiri atas tujuan media massa dan kondisi obyektif khalayak.

Tujuan sebuah media massa dan kondisi obyektif khalayaknya sendiri sangat khas. Kedua aspek ini bahkan menjadi pembeda antara satu media massa dengan media massa lainnya. Maka sebuah media massa boleh saja memiliki konsep layak berita yang berbeda dengan konsep layak berita media massa yang lain.

Dalam menerapkan konsep layak berita, seorang *gatekeeper* tidak selalu mementingkan medianya dalam konteks materi. Satu saat ia bisa saja mementingkan kepentingan khalayak, katakanlah untuk memberdayakan (*empowering*) khalayak medianya. Tetapi, pada saat yang lain, ia bisa mementingkan posisi medianya di tengah-tengah media lain. Tidak heran bila ada orang yang mengatakan bahwa berita pemilu yang sampai pada khalayak adalah hasil sebuah proses penerapan konsep layak berita (*newsworthy*) yang dipandu oleh *gatekeeper*. Akibatnya, sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa berita pemilu itu sebagai cermin sebuah realitas empirik.

Dengan penerapan konsep layak berita di atas, berita, seperti ditulis Timothy E. Cook, adalah hasil negosiasi kelayakan berita (*newsworthiness*) (1996:12). Karena itu, berita pemilu tidak bisa kita katakan sebagai berita yang senantiasa bermanfaat buat khalayak. Terlebih lagi bila konsep layak berita yang dianut sebuah media massa merupakan pengejawantahan sebuah ideologi atau memberi legitimasi terhadap ideologi tertentu. Bukankah Antonio Gramsci

¹ *Gatekeeper* adalah orang yang sangat memahami konsep layak berita yang dianut media massa tempat ia bekerja. Dalam praktek jurnalisme di Indonesia, jabatan ini bisa dipegang oleh redaktur bidang, atau redaktur pelaksana, atau wakil pemimpin redaksi atau pemimpin redaksi.

pernah mengatakan bahwa ada berita di media massa yang membuat penguasa mampu mengontrol khalayak secara halus, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kekerasan? (Dalam Dutton, 1986:37).

Dari pemikiran di atas kelihatan bahwa berita pemilu tidak selalu harus dimaknai sebagai berita yang memenuhi kebutuhan informasi khalayak tentang pemilu, melainkan juga *informasi politik yang berkaitan dengan kekuasaan (politik atau ekonomi), ideologi, kepentingan dan pasar media*. Terpulang kepada khalayak untuk memilih makna yang cocok. Cocok-tidaknya makna yang dipilih bisa dilihat melalui interpretasi dan penilaian khalayak terhadap berita pemilu. Interpretasi dan penilaian khalayak terhadap berita pemilu sendiri, sesungguhnya ditentukan oleh pengetahuan khalayak dan pembingkai berita pemilu.

Pembingkai² Berita Pemilu

Khalayak membaca surat kabar dan majalah untuk mengetahui informasi. Dari informasi yang terbaca, mereka, paling tidak, mengharapkan tiga perkara, yaitu: (1) Peristiwa atau ide yang dilaporkan benar-benar ada; (2) Kejadian (*happening*) dari peristiwa atau ide persis seperti yang dilaporkan; dan (3) Bagian-bagian dari kejadian (*happening*) yang penting buat mereka memperoleh liputan yang lebih banyak. Setelah mengetahui ketiga perkara ini, barulah mereka mencernakannya. Kemudian mereka menginterpretasikan dan menilainya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Secara umum, cara wartawan menentukan bagian-bagian dari kejadian (*happening*) dalam berita pemilu yang disebut dengan pembingkai berita pemilu. Tegasnya, membingkai berita, seperti ditulis Dietram A. Scheufele, adalah memilih dan memilah bagian dari realitas dan menjadikannya sebagai bagian yang penting dari teks berita (1999:107). Dari bagian yang penting inilah kelak diharapkan muncul interpretasi dan penilaian khalayak.

² Dalam bahasa aslinya, pembingkai disebut *framing*. *Framing* adalah perpanjangan teori *agenda setting*. Biasanya *framing* dioperasionalkan di atas basis konstruksi sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, kita bisa mengatakan bahwa pembingkai berita sebenarnya merupakan upaya untuk melontarkan nilai kepada khalayak. Lewat berita yang sudah terbingkai, tanpa sadar khalayak dididik untuk, katakanlah tidak panik menghadapi situasi pasca Pemilu 1999, memaknai hasil Pemilu 1999 secara proporsional, dan sebagainya. Para wartawan yang berbuat begitu tidak bisa disalahkan. Mereka baru bisa disalahkan bila menyiarkan berita bias tentang pemilu³.

Contoh dari pembingkai berita pemilu adalah sebuah berita berjudul "Amien Rais Capres Terkuat", yang disiarkan surat kabar *Bernas*, 4 Juni 1999. Karena berita ini sudah disiarkan, maka berita ini tentu telah memenuhi kriteria layak berita surat kabar *Bernas*. Berita ini merupakan laporan tentang jajak pendapat yang dilakukan oleh Komite Pemberdayaan Pemilih pimpinan Nurcholish Madjid. Surat kabar *Bernas* memperoleh hasil jajak pendapat itu dan meneruskannya kepada khalayak setelah meyakinkannya sebagai informasi yang bermanfaat untuk khalayak sebelum mengikuti pemilu. Barangkali ada orang yang berkata bahwa surat kabar *Bernas* sama sekali tidak punya kepentingan apa-apa dalam penyiaran berita itu. Bukankah informasi yang dikandung berita itu adalah fakta?

Sepintas lalu, memang tidak ada kepentingan surat kabar *Bernas* dalam penyiaran berita di atas. Tetapi, wartawan *Bernas* yang menulis berita itu, tentu memiliki alasan kuat ketika menempatkan Amien Rais menjadi kejadian (*happening*) yang penting dan Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh liputan yang banyak. Kalau tidak punya alasan, tidak mungkin ia berbuat begitu. Nah, alasan wartawan yang menempatkan Amien Rais sebagai kejadian (*happening*) yang penting dan memberikan liputan yang banyak pada PAN inilah yang disebut pembingkai berita.

Pembingkai berita pemilu yang dilakukan wartawan, biasanya dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti ideologi, struktur masyarakat dan kognisi sosial. Yang terakhir ini perlu bagi wartawan untuk menjadikan

³ Menurut jurnalisme, berita bias adalah berita yang tidak benar, tidak relevan, tidak netral dan tidak seimbang (Lasorsa, 1998: 161). Berita disebut benar bila peristiwa atau ide yang dikandung berita benar-benar ada. Berita dinilai relevan bila keterangan yang ada dalam berita berhubungan dengan peristiwa atau ide yang dilaporkan. Berita dikatakan netral bila keterangan yang dikandung berita tidak menghakimi (*trial by the press*) dan tidak melakukan advokasi. Berita disebut seimbang bila keterangan yang ada dalam berita tidak hanya berasal dari satu sumber saja, seperti subyek atau obyek pemberitaan saja, melainkan keduanya.

khalayak bisa memaknai berita secara proporsional. Pembingkai berita itu sendiri dilakukan wartawan ketika menulis berita. Caranya adalah dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah khalayak. Mungkin nilai-nilai itu berasal dari cerapan khalayak atas fakta yang sampai pada mereka dan hidup dalam waktu yang relatif lama. Mungkin nilai-nilai itu warisan dari masyarakat atau penguasa. Tetapi, asal nilai tidak penting bagi seorang wartawan. Yang penting baginya adalah, nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah khalayak harus diperhatikan ketika menulis berita.

Karena wartawan yakin bahwa berita pemilu adalah informasi politik yang berkaitan dengan kekuasaan (politik atau ekonomi), ideologi, kepentingan dan pasar media, maka *tak pernah terjadi dalam praktek jurnalisme, berita pemilu ditulis tanpa bingkai*. Lebih-lebih tak pernah terjadi bila media massa yang menyiarkan berita itu ingin menggusur kekuatan pro *status quo*. Maka sama sekali tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa penyiaran berita pemilu sia-sia belaka.

Berita Ideal tentang Pemilu

Akhir-akhir ini, sebagian besar pengelola media massa Indonesia menjadikan berita politik sebagai *selling point* media mereka. Ketika memasuki masa kampanye dan penghitungan suara pemilu, lahan berita politik diambil oleh berita pemilu. Untuk menyiarkan berita pemilu yang segar, para wartawan ikhlas bertungkus-lumus mencari informasi. Mereka rela membuang energi dan tenaga untuk mengumpulkan fakta dan merangkainya jadi berita. Mereka, bahkan, membiarkan diri mereka dilanda stres demi mengejar *deadline* berita.

Khalayak, rupanya, sangat merindukan berita-berita pemilu yang disiarkan media massa. Mereka merasa kehidupan mereka tidak lengkap bila tidak kena terpaan (*exposure*) media massa yang menyiarkan berita pemilu. Sekalipun sebagian besar di antara mereka paham bahwa media massa memiliki logika mereka sendiri, *toh* khalayak tetap saja merasa tidak nyaman bila tidak memperoleh berita pemilu dari media massa. Khalayak, bahkan, bisa merasakan keharuan dan kesenangan setelah memperoleh berita pemilu dari media massa.

Berdasarkan kedua kenyataan di atas, kita harus memandang bahwa penyiaran berita pemilu Indonesia perlu dikembangkan ke arah yang lebih ideal. Ukuran berita ideal tentang pemilu itu sendiri, seperti disebut Paul W. Fox (Dalam Desbarats, 1990:125) adalah, pertama, berita memuat pengetahuan-pengetahuan dasar tentang pemilu. Pengetahuan ini sangat bermanfaat buat khalayak, terutama untuk menanamkan kepercayaan pada diri mereka untuk mengikuti pemilu. Pengetahuan ini penting buat khalayak dalam rangka pengembangan sikap dan pandangan politik yang positif dalam mengikuti pemilu.

Kedua, berita memuat segala informasi yang berkaitan dengan peristiwa dan ide tentang hubungan partai politik dan khalayak. Berita seperti ini menjadi pangkal adanya interaksi sosial yang proporsional antara partai politik dan khalayak. Kalau berita seperti ini tidak ada, perasaan khalayak mengenai partai politik akan tersumbat dan bukan mustahil suatu saat meledak menjadi kekuatan destruktif.

Ketiga, menyusun agenda diskusi publik mengenai pemilu. Agenda yang menyangkut masalah publik tentang pemilu merupakan unsur penting untuk merangsang partisipasi khalayak dalam pemilu. Diskusi yang terbuka tentang agenda itu menyiratkan bahwa pelaksanaan dan pengawasan pemilu tidak hanya melibatkan parta-partai politik yang menjadi peserta pemilu dan pemerintah saja, melainkan juga seluruh warga negara.

Keempat, mempengaruhi para tokoh partai politik agar memiliki komitmen pada nilai-nilai hidup yang luhur. Dari sinilah bisa diharapkan para tokoh partai politik kelak ikhlas mewujudkan keadilan sosial dan taat pada peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku bagi mereka.

Penyiaran berita ideal tentang pemilu akan menciptakan wacana publik yang merupakan salah satu prasyarat bagi berfungsinya prinsip-prinsip dan partai-partai politik. Tetapi, penyiaran berita ideal tentang pemilu itu tidak hanya menyangkut keinginan media massa saja, melainkan juga seberapa jauh keterampilan para wartawan mereka untuk merekonstruksikan realitas pemilu jadi berita pemilu yang mengutamakan kepentingan khalayak.

Untuk melihat keterampilan wartawan memformat berita pemilu, bisa dipakai dua contoh berita berikut. Pertama, berita tentang kompetisi Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie menjadi Presiden keempat Republik Indonesia (RI) yang disiarkan majalah *Gamma* 27 Juni 1999. Berita berjudul "Siapa Menyodok di Tikungan Gelap" tersebut secara ringkas mengungkap: (1)

Peringatan bagi pemilih dalam pemilu untuk tidak menganggap pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat; (2) Contoh lain ilusi demokrasi, yaitu pemilih tidak bisa mengontrol anggota partai yang memperoleh suaranya. Sebab, petinggi partailah yang berhak menetapkan wakil yang duduk di DPR; (3) Persaingan Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie untuk menjadi Presiden keempat RI; dan (4) Pemetaan kandidat Presiden lain berdasarkan kriteria umum, seperti akseptabilitas, integritas dan kapabilitas.

Dari ringkasan di atas bisa disebut bahwa isi berita "Siapa Menyodok di Tikungan Gelap" memuat pengetahuan dasar tentang demokrasi, hubungan partai politik dan khalayak, diskusi tentang persaingan Megawati Soekarnoputri dan B.J. Habibie untuk menjadi Presiden keempat RI. Meskipun berita itu tidak mengungkapkan informasi tentang komitmen yang harus dimiliki tokoh partai politik, *toh* ketiga ciri berita pemilu di atas sudah mewakili tiga dari empat ciri berita ideal tentang pemilu. Ini sudah baik.

Kedua, berita berjudul "Partai Dengan Suara Terbanyak Berhak Dapatkan Kursi Presiden", yang disiarkan surat kabar *Kompas*, 5 Juni 1999. Berita ini, antara lain menjelaskan: (1) Pendapat Amien Rais tentang salah satu kriteria demokrasi, yaitu: partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1999 berhak memperoleh kursi presiden; (2) Pendapat Matori Abdul Jalil, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang senada dengan pendapat Amien Rais; (3) Himbauan Amien Rais agar partai politik yang memenangkan pemilu tidak serakah; dan (4) Optimisme Amien Rais bahwa pemerintahan koalisi bisa terbentuk di Indonesia. Memang berita ini ditulis berdasarkan opini pemimpin partai politik. Tetapi, yang diwawancarai wartawan bukan hanya seorang pemimpin partai politik, melainkan beberapa orang. Sudah begitu, yang menjadi *setting* dari pendapat ini adalah logika demokrasi. Artinya, para wartawan sudah menegaskan bahwa yang menjadi konteks persoalan adalah: kalau ingin menegakkan negara yang demokratis.

Bila dilihat dengan saksama, maka sesungguhnya berita "Partai Dengan Suara Terbanyak Berhak Dapatkan Kursi Presiden" sudah: (1) Menyiaran pengetahuan dasar tentang negara demokratis; (2) Memulai agenda diskusi publik tentang pemerintahan koalisi; dan (3) Mempengaruhi tokoh partai politik agar memiliki komitmen pada nilai-nilai hidup yang luhur. Ketiga ciri yang dikandung berita ini sama sekali tidak jelek. Sebaliknya, malah mendekati ciri berita ideal tentang pemilu. Karena itu, berita tersebut bisa disebut sudah cukup baik.

Melalui kedua contoh berita pemilu di atas, sesungguhnya para wartawan sudah memiliki teknik jurnalistik yang memadai untuk menulis berita ideal tentang pemilu. Tinggal sekarang keinginan media massa. Keinginan media massa ini perlu diperhatikan mengingat kini sudah ada media massa partai politik dan media massa partisan. Kedua jenis media massa ini ikut menyiarkan berita pemilu bersama-sama dengan media massa yang bebas dari pengaruh langsung partai politik. Bagaimanapun persaingan media massa untuk merebut jumlah khalayak sering kali mempengaruhi keinginan media massa untuk menyiarkan berita ideal tentang pemilu.

Manfaat Berita Pemilu

Mungkin Amien Rais tidak bisa menjadi Presiden keempat Indonesia. Mungkin pula PDI Perjuangan, partai politik yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu 1999, tidak akan memperoleh kursi presiden. Tetapi, penyiaran berita pemilu dengan topik hasil jajak pendapat bahwa Amien Rais calon terkuat Presiden dan partai politik dengan suara terbanyak berhak atas kursi presiden itu tidak sia-sia. Paling tidak ada tiga manfaat yang bisa diciptakan oleh kedua berita itu.

Pertama, kedua berita tersebut memberikan pembekalan politik pada khalayak. Khalayak jadi mengetahui tentang ciri-ciri negara demokratis. Pengetahuan ini amat berguna bagi mereka untuk menjadi warga negara yang demokrat.

Kedua, kedua berita tersebut memberikan kontribusi pada pengembangan khalayak sebagai warga negara. Khalayak bisa merasakan bahwa sebagai warga negara mereka harus memperoleh hak dan melaksanakan tanggung jawab politik mereka. Mereka merasa terlibat dalam pembuatan keputusan yang menyangkut kehidupan sosial-politik.

Ketiga, kedua berita tersebut memberikan gambaran tentang logika pemilu. Logika ini penting dan bermanfaat bagi khalayak. Dengan logika itu, kelak khalayak bisa membenarkan atau menyalahkan hasil pemilu. Dengan logika yang sama, khalayak tidak mengalami kesulitan bersikap skeptis terhadap semua hasil pemilu.

Kita tentunya sepakat bahwa ketiga manfaat di atas bisa menjadi kenyataan bila khalayak mampu memahami pesan yang dibawa berita. Persoalan yang kemudian menghadang adalah, bagaimana pemahaman khalayak terhadap berita pemilu yang disiarkan media massa? Tidak mudah menjawab pertanyaan ini tanpa penelitian yang saksama. Yang jelas, seperti ditulis W. Russell Neumari et al, pemahaman khalayak terhadap berita pemilu bisa dilihat dari: (1) Perhatian pada berita; (2) Kemampuan kognitif dalam mencerpap berita (1992:102). *Bila khalayak menaruh perhatian yang besar pada berita pemilu dan memiliki kemampuan kognitif yang tinggi dalam mencerpap berita pemilu, maka mereka bisa memahami pesan yang dibawa berita pemilu. Apa penjelasannya?*

Pertama, perhatian khalayak pada berita pemilu. Ini ditentukan oleh interaksi khalayak dengan media massa yang menyiarkan berita itu (adaptasi dari Delia dan O'Keefe, 1979:17). Dalam konteks ini, hubungan media massa yang menyiarkan berita pemilu dan khalayak adalah ibarat dua orang yang sedang berdiskusi untuk mencapai satu konsensus tentang satu masalah. Maka media massa perlu tahu agenda khalayak dan khalayak pun harus tahu agenda media massa. Problematikanya adalah, mungkinkah ini bisa terjadi?

Itu bisa terjadi bila media massa aktif mencari masukan tentang agenda khalayak. Bila sebuah media massa memiliki lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), maka litbang ini harus berbuat maksimal untuk mengetahui agenda khalayak. Litbang ini tidak cukup hanya mengadakan angket pembaca sekali setahun tentang muatan isi media yang dibutuhkan khalayak. Ia harus gesit meneliti isu yang berkembang di tengah-tengah khalayak. Kalau agenda khalayak sudah diketahui, media massa bersangkutan perlu menggabungkannya dengan agendanya sendiri. Berdasarkan resultante agendanya dan agenda khalayaklah sebuah media massa mengerahkan segala sumber dayanya untuk menyiarkan berita pemilu.

Dalam masa orde baru, kita tentu mengerti bahwa penyiaran berita pemilu tidak mempedulikan agenda khalayak. Media massa menyiarkan berita pemilu berdasarkan agenda pemerintah. Bila kondisi obyektif Indonesia menunjukkan suasana tegang, berita pemilu yang disiarkan media massa cenderung bersifat "dagelan" dan dirancang untuk menghibur khalayak. Bila kondisi obyektif Indonesia menunjukkan suasana rileks, media massa mulai menyiarkan berita pemilu yang menyiratkan perlunya reformasi politik. Tetapi, menjelang pemilu,

kondisi obyektif Indonesia lebih sering diwarnai suasana tegang. Akibatnya, berita pemilu yang bersifat “dagelan” lebih sering muncul di media massa dari pada berita pemilu yang menyiratkan perlunya reformasi politik.

Kita tentunya mengerti bahwa Pemilu 1999 dilaksanakan bukan di masa orde baru. Karena itu, kita boleh berharap bahwa berita pemilu yang disiarkan media massa bukan agenda pemerintah, melainkan agenda khalayak dan media massa sendiri. Sudahkah harapan ini menjadi kenyataan? Tidak gampang menjawab pertanyaan ini tanpa penelitian yang serius. Hanya saja berdasarkan pengamatan sepintas dari penampilan media massa, ada media massa yang terpengaruh oleh “euphoria” kebebasan pers dan kebebasan mendirikan partai politik. Media massa tersebut menempatkan diri mereka sebagai media massa partusan dan ikut berpolitik praktis. Tidak berlebihan rasanya bila Jakob Oetama, Pemimpin Redaksi surat kabar *Kompas*, menghimbau agar media massa Indonesia menempatkan diri mereka sebagai media massa independen dan menyadari posisinya sebagai lembaga demokrasi (1999:155).

Kedua, kemampuan kognitif dalam menerima berita pemilu. Ia merupakan hasil proses kognisi yang terjadi dalam pikiran khalayak setelah mencerpap berita pemilu. Karena itu, tidak mudah bagi kita untuk mengetahui kemampuan kognitif khalayak. Yang bisa diungkap adalah, berita pemilu yang ditangkap khalayak bukan berita yang mereka inferensi. Ide yang diungkapkan khalayak tentang sebuah berita pemilu adalah berita yang sudah mereka “olah” dalam pikiran mereka sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka. Pada titik inilah sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa ide seorang khalayak tentang sebuah berita pemilu berbeda dengan ide khalayak lainnya.

Menurut J. Spradley, proses kognisi terdiri atas seleksi dan kategorisasi (Dalam Hoed, 1996:267). Dengan demikian, kemampuan khalayak dalam mencerpap berita pemilu juga tergantung dari kemampuan menyeleksi dan mengklasifikasikan berita pemilu tersebut. Seorang khalayak menyeleksi dan mengklasifikasikan sebuah benta pemilu, tentunya berdasarkan paradigma yang ia anut. Jika paradigma yang dianut seorang khalayak dalam menyeleksi dan mengklasifikasikan berita pemilu berbeda dengan paradigma yang dianut khalayak lainnya, maka akan berbeda pula hasil kognisi mereka. Karena itu, pemasyarakatan paradigma yang sesuai dengan kosenp-konsep demokrasi harus diupayakan terus-menerus.

Sesungguhnya terdapat berbagai konsep tentang demokrasi. Tetapi, bagi khalayak yang sudah tiga puluh tahun lebih “ditindas” oleh rezim orde baru, yang penting adalah konsep demokrasi sebagai kategori dinamis, demokrasi sebagai cara hidup dan demokrasi dalam pengawasan sosial. Bila semua konsep tersebut sudah memasyarakat dalam kehidupan khalayak, maka boleh dianggakan bahwa khalayak bisa menyeleksi dan mengklasifikasikan benta pemilu sesuai dengan paradigma yang mengandung konsep-konsep demokrasi.

Prospek Berita Pemilu

Agaknya kita harus menerima dan memandang bahwa tidak mudah membayangkan manfaat sesungguhnya yang diperoleh khalayak setelah memperoleh berita pemilu. Bisa saja kita mengatakan bahwa berita ideal tentang pemilu memasyarakatkan sifat-sifat seorang demokrat, merangsang partisipasi khalayak dalam keseluruhan kegiatan pemilu dan mendorong khalayak untuk skeptis dan kritis terhadap hasil penghitungan suara pemilu. Tetapi, semuanya itu benar dalam tataran konsep. Keterangan di atas telah menyiratkan bahwa pemahaman khalayak tentang berita pemilu menjadi kendala bagi khalayak untuk memperoleh manfaat yang diharapkan media massa.

Dengan titik-tolak ini, kita perlu mendiskusikan prospek lain dari berita pemilu. Salah satu prospek yang masuk akal adalah, berita pemilu bisa membentuk memori kolektif khalayak. Memori kolektif sendiri, dari sisi sejarah, merupakan ungkapan masa lalu (Kartodirdjo, 1993:17). Kalau berita pemilu yang disiarkan media massa ditangkap oleh khalayak sebagai fakta sosial belaka, maka isi berita tersebut bisa menjadi fakta sejarah. Ia bisa diungkapkan dan diartikulasikan sesuai dengan kehendak khalayak.

Kisah masa lalu penting untuk untuk membebaskan khalayak dari kungkungan kekinian mereka dan melancong pada masa lampau untuk mengharap satu pedoman di masa depan (Abdullah, 1998: xiii). Kalau masa lalu itu menyangkut formulasi kehidupan berbangsa yang ideal dan orang yang mengingatnya memiliki kematangan reflektif yang tinggi, maka akan muncul kearifan untuk menjalani masa kini dengan tenang dan merekonstruksikan masa depan yang lebih baik. Maka kita bisa mengatakan bahwa berita pemilu

bermanfaat juga untuk merekonstruksikan kehidupan politik masa depan yang lebih baik. Masalah yang kemudian menghadang adalah, mungkinkah khalayak berpaling sejenak ke masa lalu untuk mengharapkan pedoman di masa depan?

Hanya khalayak yang bersikap rasional saja yang bisa kembali sejenak ke masa lalu. Sebab, khalayak seperti ini ingin senantiasa menggunakan akal dan pikiran mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Penggunaan akal dan pikiran inilah yang memungkinkan mereka mencari kearifan yang bersifat universal dan berbagai sumber. Salah satu di antaranya adalah isi berita.

Khalayak yang rasional, menurut ilmu komunikasi, adalah khalayak yang bisa bermedia massa secara proporsional. Khalayak seperti ini bisa membaca pesan-pesan yang disiratkan oleh informasi tentang kebudayaan teknologis industrial dan kebudayaan profesional. Khalayak model begini bisa memahami makna dan konteks berita yang disiarkan media massa. Lebih dari itu, khalayak tipe begini tidak bisa dipengaruhi oleh retorika kosong dan propaganda murahan lewat media massa.

Tentu kita belum tahu bagaimana persisnya khalayak media massa Indonesia. Tentu kita belum bisa menggolongkan rasionalitas khalayak media massa Indonesia. Yang jelas, sampai saat ini kita belum mendengar khalayak media massa Indonesia panik begitu memperoleh informasi dari media massa⁴. Sudah begitu, sudah banyak di antara khalayak media massa Indonesia yang mengakses informasi *superhighway*, baik melalui *World Wide Web*, *E-mail*, *Internet* maupun *Online Communications*. Kalau kedua kenyataan ini bisa kita anggap sebagai indikasi bahwa khalayak media massa Indonesia sudah rasional, maka sesungguhnya berita pemilu yang disiarkan media massa memiliki prospek membentuk memori kolektif khalayak.

⁴ Khalayak media massa Amerika Serikat (AS) pernah jadi panik setelah memperoleh informasi bahwa Asteroid XF 11 akan jatuh ke bumi tahun 2028. Menurut informasi yang disiarkan seluruh media massa AS itu, kalau Asteroid XF 11 jatuh ke bumi, maka ia akan meledak dengan kekuatan 300 ribu megaton, sekitar 20 juta kali kekuatan bom atom yang pernah jatuh di Hiroshima. Menurut perkiraan, bila Asteroid XF 11 jatuh di laut, maka akan menimbulkan badai tsunami yang mengelegakkan ombak setinggi ratusan meter dan menenggelamkan seluruh kota-kota pantai dan menyelimuti daratan dengan lumpur. Bila Asteroid XF 11 jatuh di darat, maka akan menciptakan kawah raksasa dan menghalangi sinar matahari ke bumi selama berminggu-minggu (*Forum Keadilan*, 20/04/1998). Ternyata, semua itu ramalan bohong belaka. Khalayak media massa AS mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Dengan begitu, berita pemilu, sekalipun belum bermanfaat langsung bagi khalayak, bisa diandalkan membentuk memori kolektif khalayak. Pada saamnya kelak, memori kolektif ini bisa terungkap dan terartikulasikan untuk menjadi pembanding atau pedoman dalam bersikap. Dari pandangan ini, terlihat dengan jelas bahwa berita pemilu memang perlu disiarkan media massa.

Penutup

Berbagai persoalan bisa dibahas berkenaan dengan manfaat berita pemilu bagi khalayak. Uraian di atas tidak mencakup semua persoalan itu. Tetapi, dari apa yang dipaparkan di atas, kita bisa mengetahui bahwa berita pemilu bisa, pertama, memenuhi kebutuhan informasi khalayak tentang seluk-beluk pemilu. Kedua, kalau kebutuhan informasi khalayak ini tidak terpenuhi, maka berita pemilu potensial untuk (1) Memberikan pembekalan politik pada khalayak; (2) Memberikan kontribusi pada pengembangan khalayak sebagai warga negara; dan (3) Memberikan gambaran tentang logika pemilu. Ketiga, kalau potensi berita pemilu untuk memberikan pembekalan politik pada khalayak, memberikan kontribusi pada pengembangan khalayak sebagai warga negara dan memberikan gambaran tentang logika pemilu terhalang untuk terealisasikan, katakanlah karena pemahaman khalayak yang tidak memadai, maka berita pemilu memiliki prospek untuk membentuk memori kolektif khalayak. *Ke tiga manfaat penyiaran berita pemilu ini, agaknya menyiratkan kepada kita agar kita belajar menghargai jerih-payah wartawan menyiarkan berita pemilu.* Sejauh mana kita menghargai pekerjaan wartawan dalam menyiarkan berita pemilu sendiri barangkali bisa menjadi tema sebuah tulisan yang berkaitan dengan pemilu.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. "Menteri Agama Republik Indonesia: Sebuah Pengantar Profil Biografis". Dalam Azra, Azyumardi, dan Umam, Saiful (editor), *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat. 1998.
- Cook, Timothy E. "The Negotiation of Newsworthiness". Dalam Crigler, Ann N. (editor), *The Psychology of Political Communication*, hal. 11-36. Ann Arbor: The University of Michigan Press. 1996.
- Delia, Jesse G. dan O'Keefe, Barbara J. "Constructivism: The Development of Communication in Children. Dalam Wartella, Elen (editor), *Children Communicating: Media Development of Thought, Speech, Understanding*, 1-22 Newbury Park, California: Sage Publications. 1979.
- Desbarats, Peter. *Guide to Canadian News Media*. Toronto: Harcourt Brace Jovanovich, Kanada. 1990.
- Dutton, Brian. *Sociology on Focus The Media*. New York: Longman Inc. 1986.
- Hced, B.H. "Fakta dan Citra". Dalam Hartono, Kadjat, Silalahi, Harry Tjan dan Soesastro, Hadi (editor), *Nalar dan Naluri: 70 Tahun Daed Joesoef*, hal. 266-276. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Lasorsa, Dominic L. "Measuring Bias on Television". Dalam *Journal of Communication*, Summer 1998/Vol. 48, No. 3, hal. 161-163. Cary, North Carolina: International Communication Association.
- Neuman, W. Russell, Just, Marion R. dan Crigler, Ann N. *Common Knowledge: News and The Construction of Political Meaning*. Chicago, London: The University of Chicago Press. 1992.
- Oetama, Jakob. "Kebebasan Pers dan Demokrasi". Dalam Sindhunata (editor), *Pergulatan Intelektual Dalam Era Kegelisahan*, hal. 141-158. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1999.

Scheufele, Dietram A. "Framing as a Theory of Media Effects". Dalam *Journal of Communication*, Winter 1999/Vol. 49 No.1., hal. 103-122. Cary, North Carolina: International Communication Association.

Surat Kabar:

- Bernas*, Yogyakarta, 4 Juni 1999.
- Kompas*, Jakarta, 4 Juni 1999.
- _____, Jakarta, 5 Juni 1999.

Majalah:

- Forum Keadilan*, Jakarta, 20 April 1998.
- Gamma*, Jakarta, 27 Juni 1999.